

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Harafi, Salamah Muhammad, *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Oktober 2016.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara, Cet. 1* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Anwar, dkk, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Ash Shiddieqiy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basah, Sjahran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Cahyawati, Dwi Putri, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Gramata Pustaka, 2011.
- Daim, Nuryanto A., *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Tangerang Selatan: Al-Fadhilah, 2012.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta, Amzah, 2012.

- Dzajuli, A., *Fiqh Siyasah Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Indraharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik (e-Court)*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Marbun, Syahwidad Syahrudin Fahmi, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet-3, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Maududi, Abul A'la, *Sistem Politik Islam*, terj Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Bogor: Tamita Utama, 2005.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed. 1, cet 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- R.Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Soebyanto, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1998.

Triwulan, Titik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Wade, H.W.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal :

Dezonda Rosiana Pattipawae, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”, *Jurnal Sasi* Vol. 25, No. 1 (2019). Hlm. 92 – 106.

Djoko Sutrisno, “Lembaga Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Al Fatih*, Januari-Juni, (2015). Hlm. 28.

Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Vol. 3. No. 1 (September 2018).

Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Gorontalo: UNG Press, 2014).

Herman, “Perlindungan Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”, Vol. 1. No.1 (Februari 2015).

Ida Ayu Rara Dwi Maharani, “Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN Dalam UU PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Kertha Wicara* Vol. 9, No. 1 (2019).

Imam Amrusi Jailani, dkk., “*Hukum Tata Negara Islam*”, Surabaya: IAIN Press, 2011.

- Julista Mustamu, *“Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)”*, Jurnal Sasi Vol. 20, No. 2 (2014). Hlm. 25.
- Lubna, *“Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat”*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3, No.1 (2015).
- Mohammad Afifudin Soleh, *“Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap”*. Mimbar Keadilan, Februari (2018).
- Ridwan, dkk, *“Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25, No. 2 (2018).

Skripsi`:

- Ernita, Yeni, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. http://digilib.uinsby.ac.id/27410/1/Yeni%20Ermita_C95214057.pdf.
- Esfandiari, Soraya Dwi, *“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Alauddin Makassar, 2013. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/9790/1/Skripsi%20SORAYA%20DWI%20ESFANDIARI.pdf>.
- Ni'mah, Nurul Laeilatun, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi Reformatio In Peius di Pengadilan Tata Usaha Negara”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. http://digilib.uinsby.ac.id/46308/2/Nurul%20Laeilatun%20Ni%27mah_C95216138%20.pdf.

Website`:

<https://ptun-serang.go.id/>, diakses pada 20 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB.

<https://tafsirweb.com/1597-quran-surat-an-nisa-ayat-65.html>. Diakses pada 22 Agustus 2022. Pukul 10.43 WIB.

“Jenis – jenis Putusan pengadilan Dalam Hukum Acara PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)”, <http://yuridis.id/jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara-ptunperadilan-tata-usaha-negara/>, diakses pada 26 Juni 2022, Pukul 13.58 WIB.

M. Laica Marzuki, “Pemberlakuan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI”, dalam https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/makalah_narasumber_hut_peratun_2017/prof_dr_hm_laica_marzuki_sh/Pemberlakuan%20UU%20NO.%2030%20Tahun%202014%20Tentang%20Administrasi%20Pemerintahan%20.pdf, diakses tanggal 21 Juni 2022, pukul 23.07 WIB.

Lainnya :

Arifin Marpaung, *“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa”*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010, hlm. 7.

Supandi, *“Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm. 266.

Undang – Undang :

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi `
Negara.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan
Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.